

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DUSUN DI DESA KAMPUNG BESAR KECAMATAN TELUKNAGA

Achmad Dzarkasih Darmawan¹

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Terbuka

Email Penulis Korespondensi: 043562921@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan faktor strategis dalam meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah desa dalam proses pembangunan jalan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam penyediaan anggaran melalui Dana Desa dan pengordinasian pelibatan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian menemukan kendala berupa kurangnya transparansi anggaran serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat. Penguatan mekanisme partisipatif dan transparansi menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *pemerintah desa Kampung Besar, pembangunan infrastruktur, jalan desa, partisipasi masyarakat, dana desa*

ABSTRAK

Road infrastructure development is a strategic factor in improving accessibility and the welfare of rural communities. This study aims to analyze the role of village government in the road development process, covering the planning, implementation, and supervision stages. The research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results indicate that the village government plays a very significant role, particularly in providing budgets through the Village Fund and coordinating community involvement. However, challenges remain, including limited budget transparency and suboptimal community participation. These findings highlight that the success of road infrastructure development requires strong synergy between the village government and the community. Strengthening participatory mechanisms and transparency is crucial to achieving effective, efficient, and sustainable rural road development.

Keywords: *village government, infrastructure development, village roads, community participation, Village Fund*

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa adalah jalan yang layak dan memadai. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga berperan besar dalam memperlancar kegiatan ekonomi, memperkuat koneksi antarwilayah, serta mempermudah akses terhadap layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Desa Kampung Besar merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang yang memiliki wilayah cukup luas dan terdiri dari beberapa dusun.

Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang kecil, sehingga akses jalan yang memadai sangat diperlukan untuk mengangkut hasil pertanian dan menunjang kegiatan ekonomi lainnya. Namun, kondisi infrastruktur jalan di beberapa dusun masih tergolong rusak atau belum tersentuh pembangunan secara optimal, terutama jalan-jalan penghubung antar dusun dan jalan produksi pertanian. Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki peran penting sebagai penyelenggara pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola pembangunan di wilayahnya, termasuk pembangunan infrastruktur jalan.

Melalui perencanaan partisipatif seperti Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa, pemerintah desa diharapkan mampu menggali kebutuhan riil masyarakat dan menetapkan prioritas pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Di Desa Kampung Besar, peran pemerintah desa dalam pembangunan jalan dusun mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan dana desa, pelaksanaan kegiatan fisik, hingga pengawasan dan evaluasi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dan pihak kecamatan atau kabupaten menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan dusun di Desa Kampung Besar, serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut. Infrastruktur jalan desa merupakan bagian penting dari pembangunan wilayah pedesaan yang berfungsi mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan. Namun, masih banyak desa yang menghadapi tantangan dalam realisasi pembangunan jalan, seperti keterbatasan kapasitas manajemen, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat.

Selain itu untuk mengevaluasi peran pemerintah dalam proses pembangunan jalan desa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Pembangunan infrastruktur desa merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Salah satu infrastruktur yang sangat vital dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat adalah jalan. Jalan yang memadai akan menunjang kelancaran mobilitas penduduk, mempercepat distribusi hasil pertanian dan usaha masyarakat, serta meningkatkan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dusun-dusun di Desa Kampung Besar masih menghadapi kendala dalam hal akses jalan yang layak. Beberapa ruas jalan di dusun tersebut masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Kondisi ini menghambat berbagai kegiatan warga dan berdampak langsung terhadap perekonomian serta kualitas hidup masyarakat setempat.

Melihat pentingnya peran infrastruktur jalan dalam mendukung pembangunan desa, maka diperlukan suatu upaya konkret untuk melakukan pembangunan jalan dusun yang memadai. Dengan pembangunan jalan ini, diharapkan akses antar dusun menjadi lebih baik, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, dan pelayanan publik dapat lebih mudah dijangkau. Pembangunan infrastruktur jalan ini mencakup perencanaan, pengerasan/pengerjaan badan jalan, pengurungan, drainase (bila diperlukan), Namun, di banyak daerah termasuk Desa

Kampung Besar, pelaksanaan pembangunan jalan sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Hal ini menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kampung Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan infrastruktur jalan, serta mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang diterapkan untuk mendukung pembangunan jalan di wilayah dusun. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur jalan dan bagaimana pemerintah desa mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan perannya terkait pembangunan jalan, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, pemerintah desa berperan sebagai perencana, pelaksana, pengendali, dan penanggung jawab utama kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui Dana Desa maupun sumber dana lainnya.

Infrastruktur jalan merupakan sarana dasar yang menunjang mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta akses terhadap pelayanan sosial dan ekonomi. Menurut Bappenas (2020), keterbatasan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan masih menjadi hambatan utama dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Pembangunan jalan di tingkat dusun tidak hanya berdampak pada koneksi antarwilayah, tetapi juga mendorong tumbuhnya potensi ekonomi lokal. Oleh karena itu, pembangunan jalan menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peran pemerintah desa dalam pembangunan tidak terbatas pada pelaksanaan fisik semata, tetapi juga mencakup aspek perencanaan partisipatif, pengelolaan keuangan desa, koordinasi dengan lembaga desa, dan pelibatan masyarakat. Menurut Supriatna (2017), efektivitas peran pemerintah desa sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa, kualitas perencanaan, serta tingkat partisipasi masyarakat. Pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan hingga pengawasan akan lebih berkelanjutan dan sesuai kebutuhan lokal. Teori partisipasi masyarakat menyebutkan bahwa pembangunan akan berhasil jika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap prosesnya. Arnstein (1969) dalam "Ladder of Citizen Participation" mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat mencerminkan tingkat kontrol masyarakat terhadap keputusan pembangunan. Dalam konteks desa, partisipasi sering terwujud melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), kerja bakti, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan masyarakat menjadi penting untuk mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan, termasuk pembangunan jalan dusun. Prinsip *good governance* menjadi acuan penting dalam tata kelola pembangunan desa yang baik. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan harus menjadi landasan pemerintah desa dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan. Menurut Wahab (2008), pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan cenderung lebih berhasil dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan. Lokasi penelitian berada di Desa Kampung Besar, Kecamatan Telukanaga, Kabupaten Tangerang, dengan fokus di Dusun Sukamulya pada tanggal 28 Mei 2025. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat dalam proses pembangunan jalan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang komprehensif dan kontekstual. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan observasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi informan terkait pembangunan jalan, khususnya kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan warga yang aktif dalam musyawarah atau gotong royong. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung proses pembangunan jalan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap. Observasi ini bertujuan memperoleh gambaran nyata tentang interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat selama proses pembangunan.

Sumber data penelitian dibagi menjadi primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk pelaksana teknis pembangunan jika ada. Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, laporan realisasi Dana Desa, notulen musyawarah, foto, peta lokasi pembangunan jalan, serta regulasi dan literatur terkait, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa PDTT, buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Kombinasi data primer dan sekunder ini memastikan validitas, reliabilitas, dan kedalaman analisis dalam memahami peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sangat sentral dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kampung Besar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan. Dalam tahap perencanaan, pemerintah desa memfasilitasi proses penggalian aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Dusun (Musdus) yang kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes). Aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan perbaikan jalan yang menghubungkan Dusun Sukamulya ke pusat desa, menjadi prioritas utama yang dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan didanai melalui Dana Desa. Temuan ini menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan jalan desa berjalan secara partisipatif, sejalan dengan prinsip participatory governance yang menekankan keterlibatan masyarakat sebagai subjek aktif dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga terbukti aktif dalam menilai urgensi program, sehingga memastikan pembangunan jalan sesuai kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat. Kepala desa berperan sebagai koordinator utama dan mediator antara masyarakat, kecamatan, dan kabupaten, sekaligus menjadi penggerak dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Pelaksanaan pembangunan jalan dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang dibentuk melalui musyawarah. Proses pembangunan melibatkan masyarakat secara swadaya, baik sebagai tenaga kerja maupun penyedia bahan lokal seperti batu dan pasir, sehingga biaya pembangunan dapat ditekan. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai jadwal meskipun sempat terkendala oleh cuaca, dan pengawasan dilakukan secara bergilir oleh tokoh masyarakat dan perangkat dusun. Partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong menjadi elemen penting yang memperkuat rasa memiliki terhadap proyek



pembangunan. Seperti diungkapkan salah seorang warga Dusun Sukamulya, “Kami warga ikut gotong royong saat pembangunan jalan. Ini jalan penting, jadi kami pun semangat membantu.” Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan, tetapi juga membangun solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif terhadap fasilitas umum.

Tahap evaluasi dan pelaporan dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan dan keuangan diumumkan secara terbuka kepada warga, menunjukkan upaya pemerintah desa dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa jalan sepanjang 1,2 km berhasil dibangun dengan kualitas baik, dan masyarakat merasa puas karena kini jalan dapat dilalui dengan sepeda motor maupun mobil. Dampak pembangunan jalan terhadap masyarakat cukup signifikan. Akses antar-dusun menjadi lebih mudah, biaya transportasi hasil pertanian menurun, dan aktivitas ekonomi meningkat, termasuk perdagangan serta layanan ojek desa. Seperti disampaikan oleh salah seorang petani, “Dulu susah bawa hasil tani karena jalannya becek, sekarang sudah bisa dipakai motor.” Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama melalui peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi lokal.

Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang masih dihadapi pemerintah desa dalam pembangunan jalan. Pertama, keterbatasan anggaran membuat pembangunan seluruh ruas jalan tidak dapat dilakukan sekaligus. Kedua, ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat, yaitu Dana Desa, menuntut pemerintah desa untuk pandai memprioritaskan dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Ketiga, kondisi cuaca ekstrem dapat menghambat proses pembangunan, terutama saat musim hujan. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun peran pemerintah desa sangat penting, faktor eksternal dan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan yang memerlukan strategi mitigasi yang tepat. Strategi yang dilakukan pemerintah desa meliputi pemanfaatan bahan lokal untuk menekan biaya, pengaturan jadwal pembangunan yang fleksibel, serta penguatan partisipasi masyarakat melalui gotong royong dan musyawarah rutin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Sutoro Eko (2016) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kapasitas pemerintah desa dalam memobilisasi partisipasi dan sumber daya lokal. Selain itu, penelitian ini juga mendukung pendapat Setyawan (2021) mengenai pentingnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Kesimpulannya, pembangunan jalan di Desa Kampung Besar menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan faktor kunci. Pemerintah desa bertindak sebagai perencana, penggerak, dan pengawas, sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaksana aktif dan pengawas informal. Model partisipatif ini tidak hanya memastikan keberhasilan pembangunan jalan dari sisi teknis, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial dan solidaritas komunitas lokal, sehingga proyek pembangunan menjadi lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ringkasan temuan menunjukkan bahwa perencanaan melibatkan Musdus, Musdes, dan BPD secara aktif; pelaksanaan dikelola oleh TPK dengan melibatkan swadaya masyarakat; evaluasi dilakukan bersama BPD dan masyarakat; serta dampak yang dirasakan meliputi kemudahan akses, peningkatan ekonomi, dan kepuasan warga. Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah desa merupakan elemen kunci untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di tingkat desa.

Selain peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, penelitian ini menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam mendukung pembangunan jalan desa. Kepala desa tidak hanya mengoordinasikan perangkat desa dan masyarakat, tetapi juga melakukan lobi dengan pihak kecamatan maupun kabupaten untuk memperoleh dukungan teknis dan tambahan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur desa tidak hanya bergantung pada kapasitas internal desa, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa



dalam membangun jejaring dan kolaborasi dengan pemerintah tingkat atas. Koordinasi yang efektif ini memastikan bahwa pembangunan jalan dapat terlaksana sesuai perencanaan, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan kendala cuaca. Strategi ini juga memperkuat posisi desa dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, sehingga prioritas pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya penggunaan sumber daya lokal sebagai upaya efisiensi dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan bahan bangunan dari wilayah desa, seperti batu dan pasir, serta keterlibatan masyarakat dalam tenaga kerja, tidak hanya menekan biaya pembangunan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap proyek. Masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan cenderung lebih peduli terhadap pemeliharaan jalan pasca pembangunan, sehingga aspek keberlanjutan proyek dapat terjaga. Partisipasi masyarakat ini juga membangun kapasitas sosial, solidaritas, dan kesadaran kolektif tentang pentingnya infrastruktur bagi kehidupan ekonomi dan sosial desa. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas lokal.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi menjadi faktor penentu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pelaporan keuangan dan realisasi kegiatan yang dilakukan secara terbuka, serta evaluasi bersama BPD dan tokoh masyarakat, menciptakan rasa transparansi yang tinggi. Hal ini mendukung teori participatory governance yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat meningkatkan legitimasi pemerintah desa. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pengawasan teknis dan pemeliharaan jalan jangka panjang. Pemerintah desa perlu merancang mekanisme monitoring berkelanjutan, melibatkan masyarakat sebagai pengawas informal, serta melakukan koordinasi rutin untuk perbaikan jalan yang rusak akibat cuaca atau pemakaian. Dengan langkah-langkah ini, pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kampung Besar dapat menjadi model pembangunan desa yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Kampung Besar memainkan peran yang sangat signifikan dalam pembangunan infrastruktur jalan di tingkat dusun. Peran tersebut tercermin pada seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Dalam perencanaan, pemerintah desa melaksanakan proses secara partisipatif melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes), menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan menetapkan pembangunan jalan sebagai prioritas sesuai kebutuhan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan tenaga serta bahan lokal memastikan pembangunan berjalan sesuai standar teknis dan jadwal yang telah ditetapkan. Evaluasi dan pelaporan kegiatan, termasuk penggunaan Dana Desa, dilakukan secara terbuka bersama BPD dan tokoh masyarakat, menunjukkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.

Pembangunan jalan di Desa Kampung Besar memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, antara lain peningkatan aksesibilitas antar-dusun, penurunan biaya transportasi hasil pertanian, serta peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial. Meski demikian, pemerintah desa masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran, cuaca ekstrem, dan ketersediaan tenaga teknis. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kelancaran dan kualitas pembangunan. Namun, semangat gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat menjadi penunjang utama keberhasilan program. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P. 2016. Concept & Indikator: Human Resources Management For Management Reseach. Yogyakarta : Deepublish.
- Afriani, D., & Maliah, M. (2021). Pengaruh Penggunaan Absensi Fingerprint dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada JNE Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(1), 34-54.
- Arya Gandhi, Mohamad. (2017). "Penerapan Absensi Finger Print Dalam Mendisiplinkan Kerja Pegawai di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sekolah Menengah Teknik Industri (SMTI)." Lampung.
- Aji, S., Vitriya, R., Mufarokhah, N., & Khasanah, U. (2023). The role of village apparatus in accountability, transparency and responsibility of dana desa management in Maguan Village. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 11(3), 491–500. <https://doi.org/10.35335/ijafibs.v11i3.133> [Ijafibs](#)
- Aprilla Wardhahany Siregar, S., Nurlaila Harahap, & Ahmad Syakir. (2024). Analisis penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa: Studi kasus Desa Tanjung Morawa-A, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 1(4), 233–250. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i4.485> [E-Journal Areai](#)
- Marcio J. C. Rosa Lay, & Karno, K. (2025). Transparency and accountability in village financial management to improve community welfare: An analysis of village development trends in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.62007/joumi.v3i2.526> [Alhafi Indonesia](#)
- Purba, D. A., Kesuma, A. I., & Kurniawan, I. S. (2024). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 7(3). <https://doi.org/10.30872/jiam.v7i3.8031> [JEBM](#)
- Suciana, S., Widiastuti, C. T., & Meiriyanti, R. (2025). Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi Dana Desa dengan good governance sebagai variabel intervening. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 997–1008. <https://doi.org/10.59086/jam.v4i2.943> [Jurnal Riset Ilmiah](#)
- Suyono, C. H., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh transparansi laporan keuangan, akuntabilitas, dan responsibilitas pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Bandung Tulungagung. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 2(1), 58–78. <https://doi.org/10.19105/sfj.v2i1.5671> [Ejournal UIN Madura](#)
- Sukarman, & Rohim, R. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 4(1), 27–40. <https://doi.org/10.37849/mici.v4i1.281> [Jurnal STIA Pembangunan Jember](#)
- Susanti, F., Ernitawati, Y., & Roni, R. (2023). Analysis of transparency, accountability and role of village officials in village financial management (case study in Wanásari District, Brebes Regency). *Jurnal Ekonomi*, 12(3). (sumber online) [Jurnal Sean Institute](#)

Buku

- Kuncoro, M. (2015). *Pembangunan ekonomi: Teori, masalah, dan kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, R. (2018). *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Slamet, M. (2014). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutoro, E. (2017). *Desa membangun Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Suryono, A. (2019). *Manajemen pembangunan desa*. Bandung: Alfabeta.